

LAPORAN MONEV PENGADUAN MASYARAKAT SEMESTER I 2025



**BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2025**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menindaklanjuti tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan prima Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar sebagai bagian dari unsur penyelenggara Negara yang bebas KKN terkait tuntutan masyarakat terhadap Transparansi dan akuntabilitas dan Akuntabilitas Kinerja, maka Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar telah dan terus melakukan Reformasi Birokrasi di lingkungan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar baik menyangkut aspek instrumental, Struktural dan kultural, agar kedepan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar lebih dapat meningkatkan kinerjanya secara optimal dan profesional, proaktif, peka dan peduli serta dinamis, sehingga Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar diharapkan dapat memberikan pelayanan Prima secara berhasil dan berdaya guna.

Sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 18 ayat (c) bahwa masyarakat berhak mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan. Kondisi-kondisi ini memerlukan perhatian serius dalam upaya memperbaiki manajemen pelayanan pengaduan pelayanan publik. Fokus Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, yang antara lain adalah dalam upaya penyempurnaan pelaksanaan pengaduan masyarakat. Laporan Pelaksanaan dan Tindak lanjut Pengaduan Masyarakat di lingkup BPSPL Makassar ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan pelaksanaan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan di Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar.

Maros, Juli 2025 Kepala
Balai BPSPL Makassar



A. Muh. Ishak Yusma, S.Kel, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Tujuan	7
C. Ruang Lingkup	8
D. Dasar Hukum	8
E. Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan	8
F. Saluran Pengaduan Masyarakat BPSPL Makassar	10
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	11
A. Jumlah Pengaduan Periode Ini.....	11
B. Tindak Lanjut Pengaduan Periode ini	16
C. Evaluasi Penanganan Pengaduan Periode Ini.....	34
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN	35
A. Penilaian/perbandingan Rencana Kerja dengan pelaksanaan kegiatan.....	35
B. Permasalahan	36
C. Saran perbaikan.....	36
BAB IV TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA.....	37
A. Saran atau Rekomendasi Selanjutnya.....	37
B. Tindak Lanjut Hasil Monev	37
BAB V PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Pengaduan Masyarakat yang masuk ke BPSPL Makassar Periode Semester II Tahun 2025	11
Tabel 2. 2 Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Semester 1 Tahun 2025	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan di BPSPL Makassar	9
Gambar 3. 1 Flowchat rencana kerja untuk Pengaduan masyarakat.....	35
Gambar 4. 1 Tindak lanjut Sosialisasi Semester 1	37

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik dikategorikan baik apabila memenuhi persyaratan, diantaranya adalah perubahan pola pikir penyelenggara layanan, sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan masyarakat, memenuhi prinsip kejelasan hak dan kewajiban antara penyedia layanan dan penerima layanan dan adanya umpan balik (*feedback*) yang jelas dari penerima layanan kepada penyedia layanan melalui mekanisme penanganan pengaduan masyarakat .

Ketidakjelasan mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat sering menjadi penyebab kesalahpahaman atau ketidakmengertian. Hal ini sering merupakan penyebab adanya keluhan, kritik dan saran sebagai upaya menginginkan perbaikan dalam pelayanan justru disampaikan dengan cara "kontra produktif" dan pada gilirannya akan menimbulkan hubungan yang tidak harmonis antara masyarakat dan instansi pemberi layanan.

Apabila kondisi demikian tidak segera diantisipasi dengan tindakan nyata dan konkrit maka dapat menimbulkan gejolak yang dapat menghambat penyelenggaraan pelayanan. Keterkaitan antara konsep *good -governance* (tata pemerintahan yang baik) dengan konsep *public service* (pelayanan publik) tentu sudah cukup jelas logikanya.

Terdapat fakta bahwa betapa pentingnya pelayanan publik adalah keterkaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan. Kebijakan yang paling mendasar adalah mengubah *mindset* para birokrat dari bermental penguasa menjadi birokrat yang bermental pelayan masyarakat. Kebijakan lainnya adalah penataan kelembagaan pelayanan publik, penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar pelayanan minimal, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen pelayanan, serta penerapan sistem manajemen mutu dalam pelayanan publik, termasuk manajemen penanganan pengaduan masyarakat. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di samping

sebelumnya telah terbit Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Kedua kebijakan tersebut diharapkan dapat lebih memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

B. Tujuan

Tujuan utama Monitoring dan Evaluasi laporan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat adalah menetapkan kerangka kerja untuk mengukur dan memperbaharui kondisi pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat, juga memantau dampak, hasil dan keluaran dari kegiatan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat, untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat sudah dilaksanakan secara efektif. Pemantauan dan evaluasi program pelaksanaan penanganan pengaduan secara umum bertujuan untuk mengetahui masalah dan kendala organisasi, sekaligus mencari solusi dalam melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan program kegiatan sektor pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat di BPSPL Makassar, baik secara internal maupun eksternal dalam periode satu tahunan (Jangka pendek). Tujuan umum penanganan pengaduan adalah menyediakan sistem, prosedur, dan mekanisme yang memungkinkan segala keluhan ataupun protes dari semua pihak dapat terkelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan gejolak dan mengganggu kelancaran jalannya kegiatan suatu institusi pemerintah.

Tujuan operasional pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat adalah untuk mengetahui secara dini dan berkala masalah dan kendala dalam melaksanakan program/kegiatan pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat pada Laporan Monev BPSPL Makassar dan memberikan alternatif solusinya. Sebagaimana tujuan monitoring dan evaluasi yang disampaikan diatas, maka ditetapkan sasaran : Tersedianya laporan pelaksanaan pengaduan masyarakat secara menyeluruh, masalah dan kendala

proses. Tersedianya alternatif pemecahan masalah dan kendala dalam melaksanakan program kegiatan penanganan pengaduan masyarakat.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari kegiatan ini terkait Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan pengaduan terhadap jenis ikan yang dilindungi di Wilayah Kerja, meliputi Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Selatan

D. Dasar Hukum

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di samping sebelumnya telah terbit Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Kedua kebijakan tersebut diharapkan dapat lebih memperkuat landasan dalam memberikan jaminan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat.

Permen KP no 44 tahun 2018 dan Kepmen kelautan dan Perikanan nomor 37/KEPMEN-KP/SJ/2021 tentang tim pengaduan, admin koordinator, dan admin penghubung di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu terdapat pula Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 24 TAHUN 2021 tentang Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I Dan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut.

E. Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan

Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan di Lingkungan Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar dengan nomor BPSPL/OT.300/III/2019 meliputi:

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			KETERANGAN
		Pengadu (Masyarakat / Pegawai)	Kepala Balai/Kepala UOT	Tim Penanganan Pengaduan	Admin Penghubung	Pelaksana Administrasi Surat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima pengaduan melalui lisn/Email/SMS Gateway/Whatsap/Kotak Pengaduan/Website/Surat Pengaduan/Web Lapor/ Web Whistleblower/Facebook/Instagram	MULAI			2		Form Pengaduan (Nama, No, Handphone, Substansi Pengaduan, Pihak Yang Terlibat, Waktu dan Lokasi	5 menit	Form Pengaduan	Pengaduan juga bisa disampaikan kepada Kepala Balai dan Admin Penghubung
2	Melakukan Pencatatan dan administrasi terhadap Pengaduan Masyarakat pada laman www.lapor.go.id					3	Komputer/Tab Pengaduan dan Koneksi Internet	10 menit	Nomor tracking ID Pengaduan Masyarakat di database website : www.lapor.go.id	dilakukan oleh admin penghubung
3	Memberikan Laporan berkas pengaduan masyarakat kepada ketua Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat BPSPL Makassar					4	Print Laporan Pengaduan di laman www.lapor.go.id	2 Jam	Pengaduan diteruskan kepada instansi terkait	Berdasarkan hasil evaluasi kordinator penghubung lewat
4	Penyampaian kewenangan penanganan pengaduan kepada Tim Penanganan BPSPL Makassar untuk ditindaklanjuti					5	Hasil penetapan kewenangan penanganan pengaduan dan/atau tindak lanjut pengaduan	3 hari	Penyusunan hasil penetapan kewenangan penanganan dan/atau tindak lanjut pengaduan kepada Tim Penanganan Pengaduan BPSPL Makassar dapat dalam bentuk Surat Tugas	Berdasarkan hasil evaluasi kordinator penghubung lewat aplikasi
5	Menelaah dan melakukan pengumpulan bukti dan keterangan serta bukti terkait pengaduan masyarakat, melakukan pengecekan layanan jika diperlukan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat					6	Penanganan pengaduan	2 hari	Dokumentasi, Persusutan,	apabila terkait dengan wewenang instansi lain
6	Pembuatan laporan hasil tindaklanjuti pengaduan yang ditunjukkan kepada inspektorat Jenderal dengan memuat kesimpulan dan rekomendasi oleh BPSPL Makassar dan menginput ke website lapor				SELESAI		Hasil tindaklanjuti pengaduan	5 menit	Laporan Penanganan Pengaduan serta Rekomendasi di website lapor dan hasil tindak lanjut diteruskan ke pelapor	melalui aplikasi

Gambar 1. 1 Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengaduan di BPSPL Makassar

F. Saluran Pengaduan Masyarakat BPSPL Makassar

Whatsapp	: 0813 691 33 691
Website	: https://kkp.go.id/djprl/bpsplmakassar/page/507-layanan-pengaduan
Email	: pengaduan.bpsplmakassar@kkp.go.id
Portal lapor	: www.lapor.go.id
Facebook	: https://web.facebook.com/bpspl.makassar
Twitter	: @bpspl_makassar
Instagram	: https://www.instagram.com/bpsplmakassar

Kotak Pengaduan : Kantor BPSPL Makassar Jl. Makmur Dg.Sitakka No.129 Maros

Saluran resmi pengaduan Kementerian Kelautan dan Perikanan

1. Website dengan laman ; www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id;
2. Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;
3. Surat elektronik dengan alamat pengaduan@kkp.go.id;
4. Telepon dan whatsapp dengan nomor 0811989011;
5. Surat nonelektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V Inspektorat Jenderal KKP Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110

Tim Penanganan Pengaduan UPT BPSPL Makassar

- 1 Andi Jaya, Kepala Subbagian Umum/ Ketua
- 2 Muhammad Fadly, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama/ Wakil Ketua
- 3 Arrizal Khakim, Analis Perencanaan/Sekretaris
- 4 A. Syahrudin, Analis Konservasi dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir /Anggota
- 5 Jupri, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda/Anggota
- 6 Fela Pritian Cera, Pengelola Ekosistem Laut danPesisir Ahli Pertama/Anggota
- 7 Dimas Wahyu Anggara, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama/Anggota
- 8 A. Wahyu Oramahi Yusuf AT, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama/Anggota
Muhammad Fadly, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama (Admin UPP UPT)

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Jumlah Pengaduan Periode Ini

Pada Periode Semester I 2025 ini, terdapat 5 pengaduan yang masuk ke Tim Pengaduan BPSPL Makassar. Adapun selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Pengaduan Masyarakat yang masuk ke BPSPL Makassar Periode Semester I Tahun 2025

Bulan	No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu
1	2	3	4	5	6	7	8
Januari	<i>NIHIL</i>						
Februari	<i>NIHIL</i>						
Maret	1	#8892671	Whatsaap	07 Maret 2025	Pengaduan Berkadar Non Pengawasan	Laporan dugaan Penyembelihan Lumba-Lumba di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara yang viral di Whatsaap.	Wartawan Tribun Timur

Bulan	No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu
1	2	3	4	5	6	7	8
	2	#8892681	Facebook	8 Maret 2025	Aspirasi	Penanganan Mamalia laut di Pesisir Pantai Arteri Kelurahan Karema Selatan Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Adanya kejadian mamalia laut dalam keadaan mati dan membusuk (Kode 4) di Pesisir Pantai Arteri Kelurahan Karema Selatan Kecamatan Simboro.	Masyarakat
April	NIHIL						

Bulan	No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu
1	2	3	4	5	6	7	8
MEI	3	24132505141433#9251506	Whatsapp	6-May-25	Informasi	Terdapat kejadian mamalia laut terdampar di Pantai Pantai Babatoa, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, jenis mamalia laut yang terdampar adalah jenis Lumba-lumba totol atlantik (Stenella attenuata) sebanyak 1 ekor dengan panjang sekitar 1,5 meter.	Kelompok Konservasi Laut Biru

Bulan	No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu
1	2	3	4	5	6	7	8
MEI	4	24132505 142032 #9251511	Whatsapp	5-May-25	Non Pengawasan	Laporan mamalia laut terdampar jenis Dugong di Taman Wisata Alam (TWA) Batu Angus, Kota Bitung, Sulawesi	Yapeka manado

Bulan	No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu
1	2	3	4	5	6	7	8
Mei	5	17225051431084#9251521 -	Langsung	15-May-25	Aspirasi	Pada tanggal 15 Mei 2025 i, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Sulawesi Selatan mengadakan kegiatan aksi ke kantor BPSPL Makassar dalam rangka penyampaian tuntutan terkait masukan dan kritikan atas pengelolaan kelautan dan ruang laut yang ada di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan. Aksi ini ditujukan kepada BPSPL Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Pengelolaan Kelautan KKP. Kegiatan aksi ini juga dilakukan dalam rangka memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia yang	WALHI Sulsel

Bulan	No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu
1	2	3	4	5	6	7	8
						jatuh pada tanggal 22 Mei mendatang.	
Juni	NIHIL						

B. Tindak Lanjut Pengaduan Periode ini

Tindak lanjut Penanganan Pengaduan Pada periode Semester 1 2025 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Semester 1 Tahun 2025

Bulan	No	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindakanlanjut		Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status	
1	2	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
Januari	NHIL										-
Februari	NHIL										-
Maret	1	Whatsap	07 Maret 2025	Pengaduan Berkadar Non Pengawasaan	Laporan dugaan Penyembelian Lumba-Lumba di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara yang viral di Whatsaap.	Wartawan Tribun Timur	Jupri	Andi Jaya S	1. BPSPL Makassar Wilker Kendari menelusuri Informasi sejak Jumat 7 Maret 2025 atas kejadian tsb . Kejadian benar adanya. 2. Penyuluh Perikanan Di Kab Muna sampaikan bhw Ybs (terduga pelaku) Bukan anggota Salah Satu kelompok Nelayan di Desa Komba-Komnas Kecamatan Kabangka Kab Muna Sultra . Per Sabtu 8 Maret 2025 mulai telusuri terduga pelaku di lapangan (motivasi, pemanfaatan dll). 3. aparat Penegak hukum (babinsa) setempat juga Sudah mengecek di	Selesai di Tindak Lanjuti	https://sultra.tribunnews.com/2025/03/07/viral-video-warga-sembelih-lumba-lumba-diduga-di-muna-sulawesi-tenggara-bpspl-cek-kebenarannya

Bulan	No	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindaklanjuti		Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status	
1	2	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
									lapangan dan sedang mendalami kejadian tsb. Tindaklanjuti: 1. BPSPL Makassar terus koordinasi dengan penyuluh perikanan dan aparat setempat untuk kejadian ini 2. sosialisasi Kepada terduga pelaku dan langkah lanjut agar tidak terulang kejadian tsb.		

	2	Facebook	8 Maret 2025	Aspirasi	Penanganan Mamalia laut di Pesisir Pantai Arteri Kelurahan Karema Selatan Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. Adanya kejadian mamalia laut dalam keadaan mati dan membusuk (Kode 4) di Pesisir Pantai Arteri Kelurahan Karema Selatan Kecamatan Simboro.	Masyarakat	Fadly	Andi Jaya S	Pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025 sekitar pukul 09.08 WITA, BPSPL Makassar menerima informasi yang beredar di sosial media, terkait adanya kejadian mamalia laut dalam keadaan mati dan membusuk (Kode 4) di Pesisir Pantai Arteri Kelurahan Karema Selatan Kecamatan Simboro. Kemudian tim BPSPL Makassar Wilker Mamuju melakukan koordinasi dengan masyarakat nelayan pesisir untuk membantu melakukan penanganan mamalia laut tersebut. Berdasarkan hasil identifikasi dan pengukuran morfometrik yang dilakukan oleh tim respon cepat di lapangan, jenis mamalia laut yang terdampar adalah jenis Paus Pilot sirip pendek (Short finned pilot whale) sebanyak	Selesai di Tindak Lanjuti	
--	---	----------	--------------	----------	---	------------	-------	-------------	--	---------------------------	--

									1 ekor dengan panjang kurang lebih 3,3 meter dan lebar 1 meter dengan jenis kelamin betina. Kondisi paus pada saat ditemukan sudah dalam keadaan mati dan membusuk (Kode 4). Selanjutnya, berdasarkan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan keterbatasan tenaga & sarana prasarana maka dilakukan penanganan dengan cara ditenggelamkan. Proses penenggelaman dilakukan dengan mengikat bangkai paus tersebut kemudian ditarik dengan kapal nelayan menuju ke wilayah laut dalam. Setelah tiba di lokasi penenggelaman, bangkai paus kemudian diikat dengan pemberat batu yang tersedia untuk kemudian		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									<i>ditenggelamkan. Bangkai paus di tenggelamkan pada koordinat 2°40'24.98" LS dan 118°52'36.44" BT.</i>		
April	NHIL										-

Bulan	No	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindaklanjut		Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status	
1	2	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
		Whatsapp	6-May-25	Informasi	Terdapat kejadian mamalia laut terdampar di Pantai Pantai Babatoa, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, jenis mamalia laut yang terdampar adalah jenis Lumba-lumba totol atlantik (Stenella attenuata) sebanyak 1	Kelompok Konservasi Laut Biru	Fadly	Andi Jaya	Tanggal 6 Mei 2025 sekitar pukul 08.00 WITA, BPSPL Makassar menerima informasi dari Kompok Laut Biru terkait adanya kejadian mamalia laut terdampar di Pantai Pantai Babatoa, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan informasi yang dihimpun, jenis mamalia laut yang terdampar adalah jenis Lumba-lumba totol atlantik (Stenella attenuata) sebanyak 1 ekor dengan panjang sekitar 1,5 meter. Terdapat luka dibagian ekor dan perut. Upaya penyelamatan dilakukan oleh warga sekitar Pantai babatoa dengan mendorong Lumba lumba tersebut kembali ke laut, yang	Selesai di Tindak lanjuti	-

Bulan	No	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindaklanjutan		Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status	
1	2	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
					ekor dengan panjang sekitar 1,5 meter.				dipandu secara langsung oleh Kompak Laut Biru dan BPSPL Makassar. Setelah 2 kali percobaan akhirnya Lumba lumba tersebut berhasil kembali ke laut, upaya penyelamatan berlangsung sampai pukul 09.00 WITA. Sampai dengan laporan ini dibuat, Lumba lumba tersebut tidak muncul lagi di sekitar pantai Babatoa, Kompak Laut Biru masih akan terus memantau dan melaporkan kembali jika Lumba lumba tersebut muncul kembali.		

		Whatsa pp	5-May-25	Non Pengawasa n	Laporan mamalia laut terdampar jenis Dugong di Taman Wisata Alam (TWA) Batu Angus, Kota Bitung, Sulawesi	Yapeka manado	Yashe r Sakita	Muham mad Fadly	<i>Pada tanggal 5 Mei 2025, BPSPL Makassar Wilker Manado melakukan penanganan mamalia laut terdampar jenis Dugong di Taman Wisata Alam (TWA) Batu Angus, Kota Bitung, Sulawesi Utara bersama PSDKP Bitung, DKP Provinsi Sulawesi Utara, BKSDA Sulawesi Utara, WCS, Yapeka, dan masyarakat setempat.</i> <i>Anakan dugong tersebut telah diupayakan untuk dilepasliarkan ke arah laut, namun tetap kembali ke lokasi yang sama sehingga diputuskan untuk merelokasi anakan dugong tersebut di dalam karamba milik nelayan yang berada di sekitar lokasi terdampar. Hal tersebut dilakukan agar anakan dugong dapat dipantau dan dirawat.</i>	Selesai di Tindak lanjuti	<i>Setelah dilakukan perawatan anak dugong itu akhirnya mati dikarenakan luka-luka parah</i>
--	--	--------------	----------	-----------------------	---	---------------	----------------------	-----------------------	---	------------------------------------	--

									<i>Berdasarkan hasil koordinasi dengan tim, penanganan anakan dugong terbagi menjadi pemantauan kondisi anakan dugong dan pencarian keberadaan induk dugong di sekitar lokasi terdampar dengan menggunakan drone.</i> <i>Anakan dugong tersebut memiliki panjang total 128 cm dan lingkaran badan 70 cm, serta berjenis kelamin betina. Selain itu, ditemukan luka gores di beberapa bagian tubuhnya. BPSPL Makassar mengapresiasi langkah cepat dan kolaboratif yang dilakukan oleh tim di lapangan. Respons cepat ini mencerminkan kekuatan kolaborasi lintas sektor dalam perlindungan spesies laut yang dilindungi.</i> <i>BPSPL Makassar bersama dokter</i>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

									<i>hewan melakukan penanganan dengan memberi susu formula yang telah dicampurkan dengan obat pereda nyeri, serta memberi obat luar berupa salep pada luka di tubuh anakan dugong. Hasil pemantauan menggunakan drone hingga saat ini juga tidak ditemukan keberadaan indukan dugong di sekitar lokasi anakan dugong terdampar.</i>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Bulan	No	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindaklanjuti		Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status	
1	2	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
		Langsung	15-May-25	Aspirasi	Pada tanggal 15 Mei 2025 i, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) Sulawesi Selatan mengadakan kegiatan aksi ke kantor BPSPL Makassar dalam rangka penyampaian tuntutan terkait masukan dan kritikan atas pengelolaan kelautan dan ruang laut yang ada di Indonesia khususnya di Sulawesi	WALHI Sulsel	Fadly	Andi Jaya	Setelah penyampaian aksi dari WALHI, tuntutan yang juga dituangkan dalam bentuk surat diberikan secara simbolis kepada BPSPL Makassar yang diterima secara langsung oleh Plt. Kepala Balai, Bapak A. Muhammad Ishak Yusma. Setelah itu, Bapak Plt. Kepala BPSPL Makassar menyampaikan beberapa hal terkait tuntutan yang sebelumnya disampaikan oleh perwakilan WALHI yakni antara lain: 1. BPSPL Makassar mengucapkan terima kasih atas aspirasi yang diberikan oleh WALHI. WALHI merupakan salah satu organisasi gerakan lingkungan yang konsisten dalam mengawal isu	Selesai di Tindak lanjuti	

Bulan	No	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindakan lanjut		Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status	
1	2	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
					Selatan. Aksi ini ditujukan kepada BPSPL Makassar sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Pengelolaa n Kelautan KKP. Kegiatan aksi ini juga dilakukan dalam rangka mempering ati Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia yang jatuh pada tanggal 22 Mei mendatang.				lingkungan termasuk isu-isu kelautan di Sulawesi Selatan terutama di perairan sekitar makassar 2. Aspirasi yang disampaikan oleh WALHI merupakan hasil dari kajian dan suara dari masyarakat nelayan. Hal tersebut menjadi bagian penting dari proses demokrasi lingkungan dan BPSPL Makassar sebagai kantor unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menerima dengan baik semua aspirasi yang telah disampaikan oleh WALHI 3. BPSPL Makassar memiliki tugas dan fungsi yakni pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan		

Bulan	No	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindakan lanjut		Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status	
1	2	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
									pemanfaatan sumberdaya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya. Selain itu, BPSPL Makassar memiliki tugas dalam penataan kawasan konservasi hingga pendampingan penetapan kawasan konservasi oleh pemerintah provinsi. Kedua tugas utama tersebut dapat dijalankan apabila adanya upaya kolaboratif bersama masyarakat setempat 4. BPSPL Makassar memahami kekhawatiran dari WALHI terkait isu-isu kelautan. Namun dalam konteks reklamasi dan penambangan pasir, hal tersebut berada di luar kewenangan BPSPL Makassar seperti yang tadi juga sudah disampaikan		

Bulan	No	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindakan lanjut		Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status	
1	2	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
									oleh perwakilan dari WALHI. Namun, BPSPL Makassar akan tetap memastikan bahwa setiap kegiatan di laut wilayah Sulawesi akan memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan dan keberlanjutan 5. Lima (5) poin aspirasi yang telah disampaikan akan disampaikan secara berjenjang oleh BPSPL Makassar ke Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan. Termasuk tujuan aspirasi yang disampaikan hari ini yakni dalam rangka memperingati Hari Keanekaragaman Hayati Internasional atau International Day For Biodiversity yang akan diperingati pada tanggal 22 Mei 2025 mendatang dengan tema Human Natures		

Bulan	No	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindakan lanjut		Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status	
1	2	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
									<i>and Sustainable Development</i> <i>6. Aspirasi ini tidak hanya menjadi catatan penting bagi BPSPL Makassar tetapi juga menjadi refleksi bersama akan pentingnya menjaga laut sebagai ruang hidup masyarakat pesisir dan habitat keanekaragaman hayati. Hal ini juga menjadi landasan bagi kita semua untuk bisa menjaga laut secara kolaborasi dan keberlanjutan</i> <i>7. Mari bersama-sama jadikan momen ini sebagai pengingat bahwa laut tidak hanya menjadi ruang ekonomi tetapi juga menjadi rumah keanekaragaman hayati dan ruang hidup masyarakat pesisir. BPSPL Makassar sebagai bagian dari</i>		

Bulan	No	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindaklanjutan		Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status	
1	2	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
									pemerintah bersama WALHI sebagai stakeholder mempunyai komitmen untuk membangun pengelolaan ruang laut yang wajib menjunjung tinggi prinsip kelestarian ekosistem, keberlanjutan, dan keadilan ekologi dalam pemanfaatan ruang laut. KKP turut menjadikan ekologi sebagai panglima dalam pemanfaatan ruang laut 8. Aspirasi yang sudah diterima oleh BPSPL Makassar selanjutnya akan segera ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan sebagai bahan evaluasi terhadap pengambilan atau keputusan suatu kebijakan. Terima		

Bulan	No	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindaklanjut		Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status	
1	2	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12
									<i>kasih atas aspirasi yang telah diberikan.</i>		
	NHIL										

C. Evaluasi Penanganan Pengaduan Periode Ini

Dalam pelaksanaan penanganan pengaduan semester I Tahun 2025 tidak terdapat kendala dan berjalan dengan lancar.

D. Monitoring dan Evaluasi Terhadap SDM/Petugas Penanganan Pengaduan

Pada periode Semester 1 telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap SD/Petugas Pengaduan dengan menggelar Forum Konsultasi Publik dalam Review Standar Pelayanan Publik. Forum ini adalah sarana menjangkau aspirasi sekaligus Langkah monitoring dan evaluasi terhadap petugas pelayanan termasuk petugas penanganan pengaduan BPSPL Makassar. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan unit kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan kabupaten/kota se Sulawesi, akademisi, LSM, media serta pelaku usaha. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 30 Juni 2025 di Kantor BPSPL Makassar secara hybrid.



Kegiatan Forum Konsultasi Publik sebagai sarana evaluasi Petugas Penanganan Pengaduan BPSPL Makassar

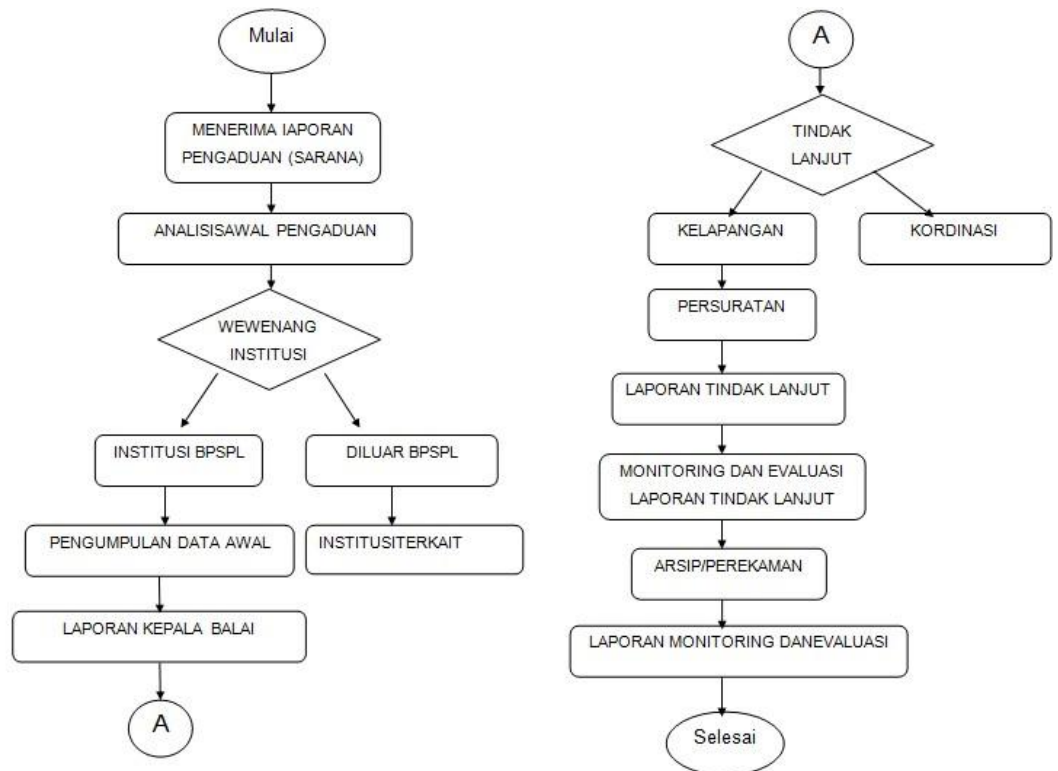
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. *Penilaian/perbandingan Rencana Kerja dengan pelaksanaan kegiatan*

A.1. Rencana kerja

Rencana kerja terkait pengaduan masyarakat dapat dilihat pada

Gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Flowchat rencana kerja untuk Pengaduan masyarakat

A.2. Perbandingan Rencana dan Pelaksanaan

Dari pelaksanaan kegiatan terkait laporan pengaduan masyarakat Semester I sudah sesuai dengan rencana kegiatan yang ada.

B. Permasalahan

Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan tindak lanjut laporan pengaduan periode ini.

C. Saran perbaikan

Rekomendasi untuk periode ini adalah agar tim pengaduan masyarakat di periode selanjutnya memasukkan materi terkait Pengelolaan Pengaduan (Technical Note for Grievance Redress Mechanisms) Oceans for Prosperity Project – LAUTRA Kementerian Kelautan dan Perikanan, Republik Indonesia Hal ini dikarenakan pada periode semester 2 kedepan akan dilaksanakan kegiatan LAUTRA.

BAB IV TINDAK LANJUT HASIL MONEV SEBELUMNYA

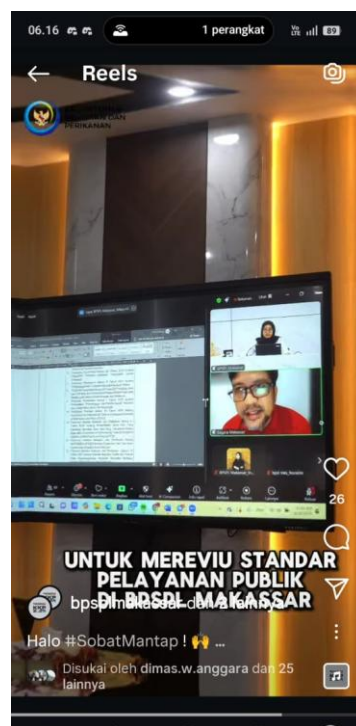
A. *Saran atau Rekomendasi Selanjutnya*

Rekomendasi tim pengaduan masyarakat di periode selanjutnya memasukkan materi terkait Pengelolaan Pengaduan (Technical Note for Grievance Redress Mechanisms) Oceans for Prosperity Project – LAUTRA Kementerian Kelautan dan Perikanan, Republik Indonesia Hal ini dikarenakan pada periode semester 2 kedepan akan dilaksanakan kegiatan LAUTRA.

B. *Tindak Lanjut Hasil Monev*

Sebagai tindak lanjut dari saran atau rekomendasi sebelumnya, Tim Penanganan Pengaduan BPSPL Makassar telah Konsultasi Publik dimana pada kegiatan tersebut turut disosialisasikan sarana pengaduan BPSPL Makassar. Adapun Gambaran kegiatan dapat diakses melalui tautan berikut :

<https://www.instagram.com/reel/DLkR0FWztml/?igsh=MW9rYWkxNGM3OG0cQ==>



Gambar 4. 1 Tindak lanjut Sosialisasi Semester 1

BAB V PENUTUP

Pada periode Semester I 2025, terdapat **5 (lima)** pengaduan masyarakat yang masuk. Pada periode kedepan diharapkan dilakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai adanya sarana pengaduan masyarakat di BPSPL Makassar.

BUKTI DUKUNG APLIKASI LAPOR.GO.ID

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar

☆☆☆☆☆ 0

LIHAT TOTAL

PEMANTAUAN

Riwayat Intervensi

LAPORAN

Kelola

Terdisposisi

Arsip

Terlempar

Salinan

Selesai

Terpilih

Sukses

Laporan Terpilih & Sukses

Statistik - Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) ...

PEMANFAATAN DATA PENGELOLAAN LAPORAN PENGGUNA

Instansi: Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar

Periode Laporan Masuk: 01/01/2025 - 07/31/2025

Hitung Laporan Form Manual: ☒

SUBMIT

Nama Instansi: Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar

Nomor SK: -

Terakhir Kali Dilihat: 2025-07-30 22:40:13

Instansi belum mengupload file SK

Rekapitulasi Kinerja

Belum Terverifikasi	Belum Ditindaklanjuti	Proses	Selesai	Tunda	Arsip	Total (Tanpa Arsip dan Tunda)	%TL	RTL	RHP	RV
0	0	0	5	0	0	5	100	1	0	1

Pengelolaan Laporan Masuk

Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar

☆☆☆☆☆ 0

LIHAT TOTAL

PEMANTAUAN

Riwayat Intervensi

LAPORAN

Kelola

Terdisposisi

Arsip

Statistik - Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) ...

PEMANFAATAN DATA PENGELOLAAN LAPORAN PENGGUNA

Pengelolaan Laporan Masuk

Laporan Belum Terverifikasi	Terdisposisi Belum Ditindaklanjuti	Terdisposisi Sedang Diproses	Terdisposisi Selesai	Laporan Tertunda	Laporan Arsip
0	0	0	5	0	0
Total					5

Sumber Laporan

Facebook	Tatap Muka	Whatsapp
1	1	3
Total		5

Klasifikasi Laporan

null	
5	
Total	5

Ke Atas

